

LAPORAN PROGRAM SOSIAL DI INDONESIA: MENINGKAT TETAPI BELUM OPTIMAL

Pengukuran Indeks Barometer Sosial 2018



Jakarta, November 2018

Didukung oleh :

This Programme
is Funded by the
European Union



infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development



Dokumen ini diterbitkan dengan dukungan dari Uni Eropa. Isi dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis, dan tidak mencerminkan pendapat dari Uni Eropa, OXFAM di Indonesia, dan Kementerian Sosial.

LAPORAN

PROGRAM SOSIAL DI INDONESIA: MENINGKAT TETAPI BELUM OPTIMAL

Pengukuran Indeks Barometer Sosial 2018

Tim Penyusun:

Bagus Takwin
Alfindra Primaldhi
Paksi Walandow
Sahat K. Panggabean

Editor Bahasa:

Ngarto Februana

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

JAKARTA
November 2018



Daftar Isi

Ringkasan	v
BAB 1. Pendahuluan: Program Sosial dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3 Target Hasil	2
BAB 2. Bantuan Sosial yang Dibutuhkan Warga	3
2.1. Kebutuhan terhadap Program Sosial	3
2.2. Pengetahuan tentang Program Sosial	4
2.3. Kualitas Program Sosial	5
BAB 3. Indeks Barometer Sosial	8
3.1. Indeks Barometer Sosial Nasional	8
3.2. Penilaian Warga mengenai Program Sosial	11
Bab 4. Kesimpulan dan Rekomendasi	18
4.1. Kesimpulan	18
4.2. Rekomendasi	19
Lampiran 1	20
Lampiran 2	23



Ringkasan

Pada tahun 2018, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) kembali melakukan pengukuran Indeks Barometer Sosial (IBS). Tujuannya adalah mengevaluasi program sosial yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia selama tahun 2017 sampai pertengahan 2018. Pengukuran Barometer Sosial dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Dalam survei itu digunakan alat ukur Barometer Sosial yang mengukur penilaian warga mengenai program sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Dari survei diketahui bahwa hingga menjelang akhir 2018, kebutuhan akan program sosial masih tinggi. Ada perbedaan urutan kebutuhan warga, seperti kebutuhan pelayanan dan jaminan kesehatan, bantuan usaha, dan penyediaan lapangan kerja. Kebutuhan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Dilihat dari persentasenya, semua kebutuhan tersebut memiliki urgensi yang tinggi. Hasil pengukuran IBS juga mengindikasikan semakin banyak warga yang mengetahui adanya program sosial. Ini memperlihatkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas informasi dan publikasi mengenai bantuan sosial. Program sosial terkait dengan pekerjaan memang masih yang paling sedikit diketahui, tetapi persentase warga yang mengetahui meningkat dibandingkan tahun lalu.

Secara keseluruhan, hasil Indeks Barometer Sosial 2018 adalah 6,6. Angka ini lebih tinggi daripada Indeks Barometer Sosial 2017 sebesar 6,2 dan Indeks Barometer Sosial 2016, sebesar 5,8. Meski hasil pengukuran saat ini belum mengubah kategori IBS dari “cukup mengupayakan pencapaian keadilan sosial” menjadi “sangat mengupayakan pencapaian keadilan sosial”, kenaikan ini cukup besar. Hanya jika dilihat dampaknya, kenaikan ini belum optimal. Masih diperlukan peningkatan kualitas program sosial agar perubahannya signifikan menjadi “sangat mengupayakan pencapaian keadilan sosial”. Ada peningkatan kualitas program sosial yang diselenggarakan pemerintah. Warga menilai manfaat program sosial meningkat, lebih tepat sasaran, lebih mudah dan cepat diperoleh, serta tidak lebih membebani dibanding sebelumnya. Penyelenggaraannya lebih sesuai dengan aturan. Bentuk bantuannya lebih sesuai dengan kebutuhan warga. Meskipun demikian masih banyak warga yang menilai program sosial yang diselenggarakan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Untuk memperbaiki kondisi yang masih dinilai membebani, pelaksanaan program sosial seharusnya menghindari proses yang berbelit-belit, memakan waktu banyak, rumit, dan bentuk bantuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelaksanaannya perlu dibuat lebih efisien dan fleksibel.

BAB 1

Pendahuluan

“

We all need to work together, because there are no jobs on a dead planet; there is no equity without rights to decent work and social protection, no social justice without a shift in governance and ambition, and, ultimately, no peace for the peoples of the world without the guarantees of sustainability.

(Sharan Burrow)

1.1. Latar belakang

Upaya untuk mencapai keadilan sosial selalu merupakan jalan panjang, membutuhkan komitmen yang kuat dan stamina tinggi. Hanya usaha keras berkelanjutan yang dapat menjamin perdamaian, keadilan sosial, dan kesejahteraan. Pemerintah negara Indonesia sejak awal dimaksudkan untuk mencapai itu semua sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." Hingga kini, setelah 73 tahun merdeka, upaya mencapai itu semua terus dilakukan, diperjuangkan.

Kini di Indonesia masih ditemukan kemiskinan, pengangguran, dan orang-orang yang luput dari proteksi sosial. Tentu saja ada kemajuan dari waktu ke waktu. Namun kemajuan itu masih belum cukup untuk dapat mengentaskan warga dari kemiskinan dan menegakkan keadilan. Kemiskinan yang ada masih memberi isyarat bahwa keadilan belum sepenuhnya tegak. Kemiskinan, sebagai musuh keadilan, masih menampilkan kemenangannya di beberapa bagian kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini dipersepsikan oleh warga, dan diungkapkan dalam wawancara dengan tim International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada pertengahan kedua tahun 2018.

Pada tahun 2018, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) kembali melakukan pengukuran Indeks Barometer Sosial (IBS). Tujuannya adalah mengevaluasi program sosial yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia selama tahun 2017 sampai pertengahan 2018. Indeks Barometer Sosial menjadi indikator seberapa jauh negara mengupayakan keadilan sosial melalui bantuan sosial.

Pengukuran Barometer Sosial dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Dalam survei itu digunakan alat ukur Barometer Sosial yang mengukur penilaian warga mengenai program sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia. Perumusan metode, pelaksanaan survei, dan pengolahan data, serta pembuatan laporan akhir dilakukan oleh tim peneliti INFID dan dikoordinasi oleh Bagus Takwin.

Pengukuran Indeks Barometer Sosial ini merupakan bagian dari tugas INFID sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki mandat memantau pembangunan. Berdasarkan hasil pemantauan itu, ada upaya mengubah kebijakan dan program pembangunan agar menjadi lebih inklusif, bermanfaat, imparial, dan tidak diskriminatif. Dalam menjalankan mandatnya, INFID menaruh perhatian besar terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Pengukuran kali ini merupakan usaha untuk melengkapi bentuk pemantauan pembangunan Indonesia, yang selama ini sudah dilakukan INFID. INFID telah melakukan berbagai bentuk pemantauan pembangunan melalui penelitian dan kajian, baik kajian dokumen maupun penelitian lapangan yang penting dan bermanfaat. Dengan pengukuran ini diharapkan pemantauan INFID memiliki daya pengaruh yang lebih luas, dan dipublikasikan kepada khalayak luas oleh media massa dan menjadi perhatian publik. Dengan dasar itu, pengukuran Barometer Sosial dilakukan oleh INFID. Dengan pengukuran ini pemantauan pembangunan yang secara metodologis kuat dan bertanggung jawab dapat dilakukan.

1.2. Tujuan

- » Mengetahui sejauh mana pemerintah daerah di Indonesia menjalankan program sosial;
- » Menghasilkan alat advokasi pembangunan yang kuat di berbagai daerah di Indonesia;
- » Menghasilkan laporan pemantauan pembangunan yang reguler dan mudah dimengerti serta dipahami oleh publik, media massa, dan pengambil kebijakan;
- » Menyediakan umpan balik (*feedback*) dan evaluasi mengenai kinerja dan capaian kebijakan-program sosial bagi pengambil kebijakan tingkat nasional dan daerah mengenai kinerja serta capaian program sosial.

1.3 Target Hasil

Hasil yang ditargetkan riset ini adalah laporan survei yang disebut Indeks Barometer Sosial. Laporan Indeks Barometer Sosial 2018 akan dirilis akhir Januari 2019, untuk dipublikasikan secara luas di berbagai media massa utama Indonesia—yang juga menjadi target dari pengukuran ini.



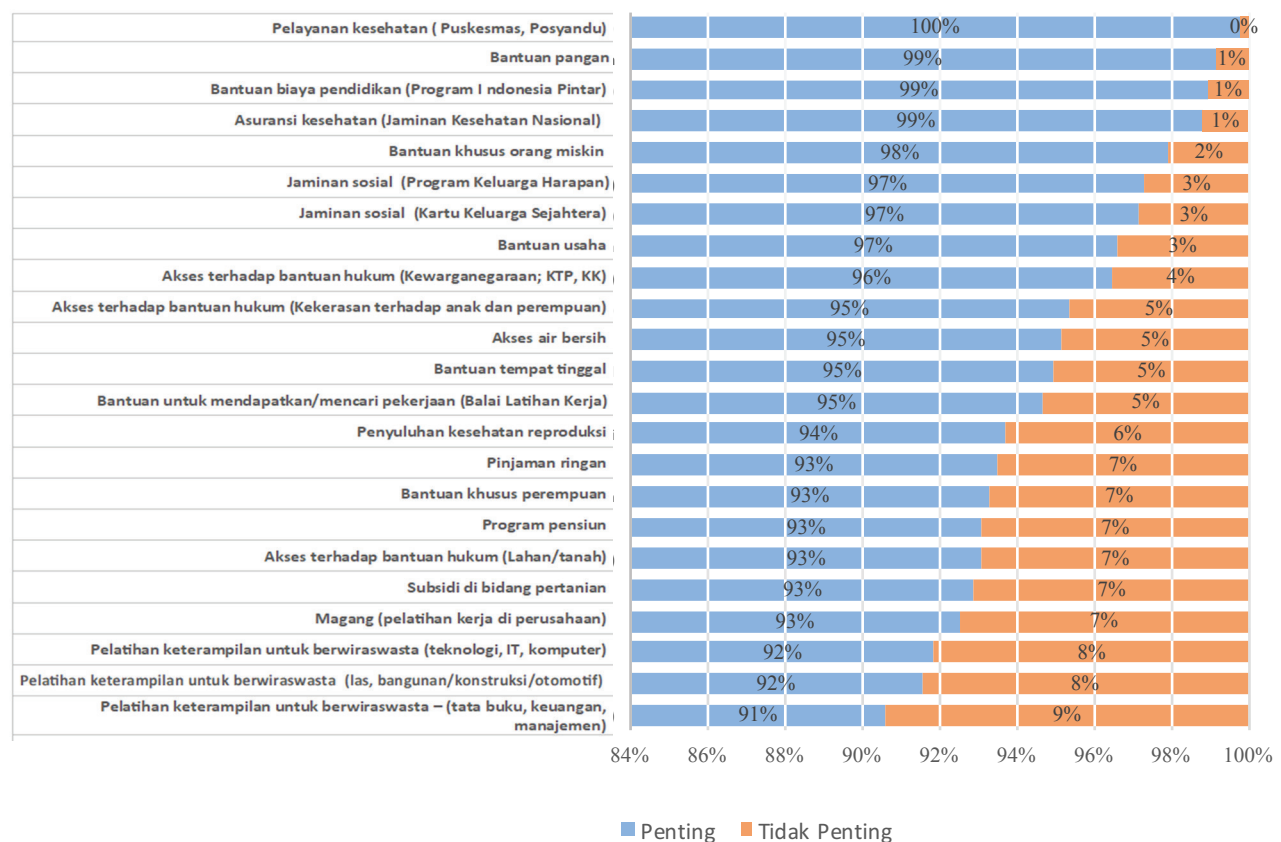
BAB 2

Bantuan Sosial yang Dibutuhkan Warga

2.1. Kebutuhan terhadap Program Sosial

Seperti pada tahun 2016/2017, kebutuhan akan program sosial di Indonesia pada tahun 2017/2018 tetap tinggi. Warga masih membutuhkan program sosial, terutama pelayanan dan jaminan kesehatan, bantuan pangan, bantuan biaya pendidikan, bantuan usaha, subsidi pertanian, dan program pensiun, pinjaman ringan, dan penyediaan pekerjaan. Grafik berikut ini memperlihatkan persentase kebutuhan bantuan bagi masyarakat.

Grafik 1. Jenis Program Sosial yang Dibutuhkan Masyarakat



Berdasarkan data dari grafik 1, hingga menjelang akhir 2018, kebutuhan akan program sosial masih tinggi. Jika dilihat secara lebih rinci, ada perbedaan urutan kebutuhan warga dan ada kebutuhan yang meningkat dari tahun sebelumnya, seperti meningkatnya kebutuhan pelayanan dan jaminan kesehatan, bantuan usaha, dan penyediaan lapangan kerja. Dilihat dari persentasenya, semua kebutuhan tersebut memiliki urgensi yang tinggi.

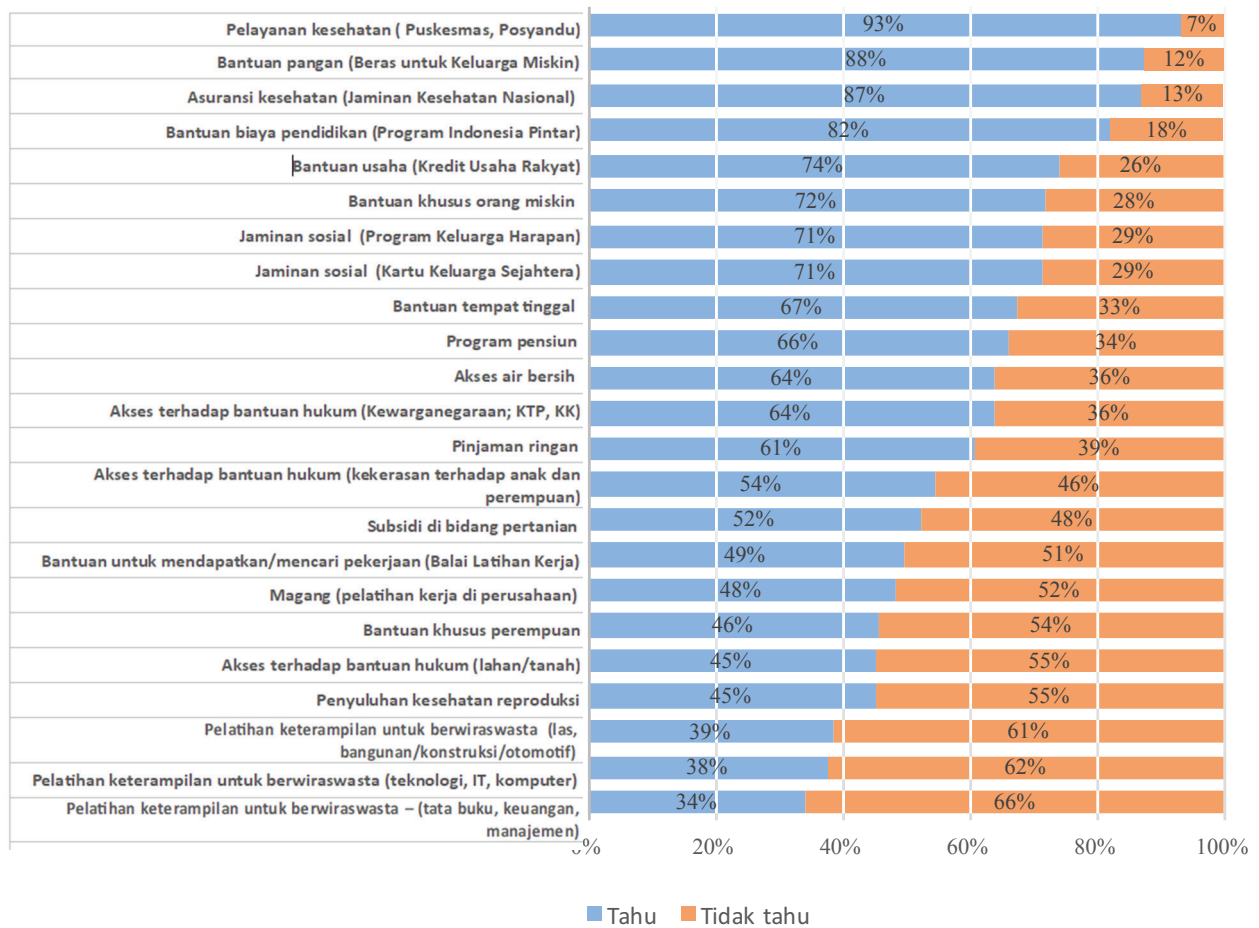
2.2. Pengetahuan tentang Program Sosial

Hasil pengukuran IBS mengindikasikan bertambah banyak warga yang mengetahui adanya program sosial. Hal ini memperlihatkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas informasi serta publikasi mengenai bantuan sosial. Program sosial terkait dengan pekerjaan memang masih yang paling sedikit diketahui warga. Tetapi persentase warga yang mengetahuinya meningkat dibandingkan tahun lalu. Balai latihan kerja dan bantuan pelatihan terkait dengan keterampilan kerja lainnya tetap diketahui oleh lebih sedikit orang. Walau demikian sudah ada peningkatan jumlah warga yang mengetahuinya. Pemanfaatan bantuan meningkat dari tahun sebelumnya meski masih tergolong rendah. Warga yang mengetahui adanya program bantuan hukum untuk kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta kasus lahan atau tanah, bertambah banyak meski pemanfaatannya masih tergolong sedikit..

Ada peningkatan kesesuaian antara program bantuan yang dibutuhkan dan program bantuan yang disediakan pemerintah. Ini memperlihatkan indikasi adanya peningkatan kesungguhan pemerintah dalam menyediakan program bantuan sosial. Analisis kebutuhan sudah dilakukan dan usaha penyesuaian pada tahun 2017/2018 sudah dijalankan. Meski demikian, kesesuaian ini masih perlu ditingkatkan agar program sosial lebih optimal dan manfaatnya lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Kecenderungan peningkatan ini merupakan suatu tanda positif dari usaha pemerintah menjalankan program sosial. Dibandingkan dengan tahun 2016/2017, kesesuaian antara kebutuhan dan program yang disediakan lebih tinggi. Pengetahuan warga tentang program sosial mendorong warga untuk memanfaatkan program-program itu. Peningkatan manfaat dan kesesuaian program sosial perlu terus didorong agar lebih efektif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga.



Grafik 2. Program Sosial yang Diketahui Masyarakat



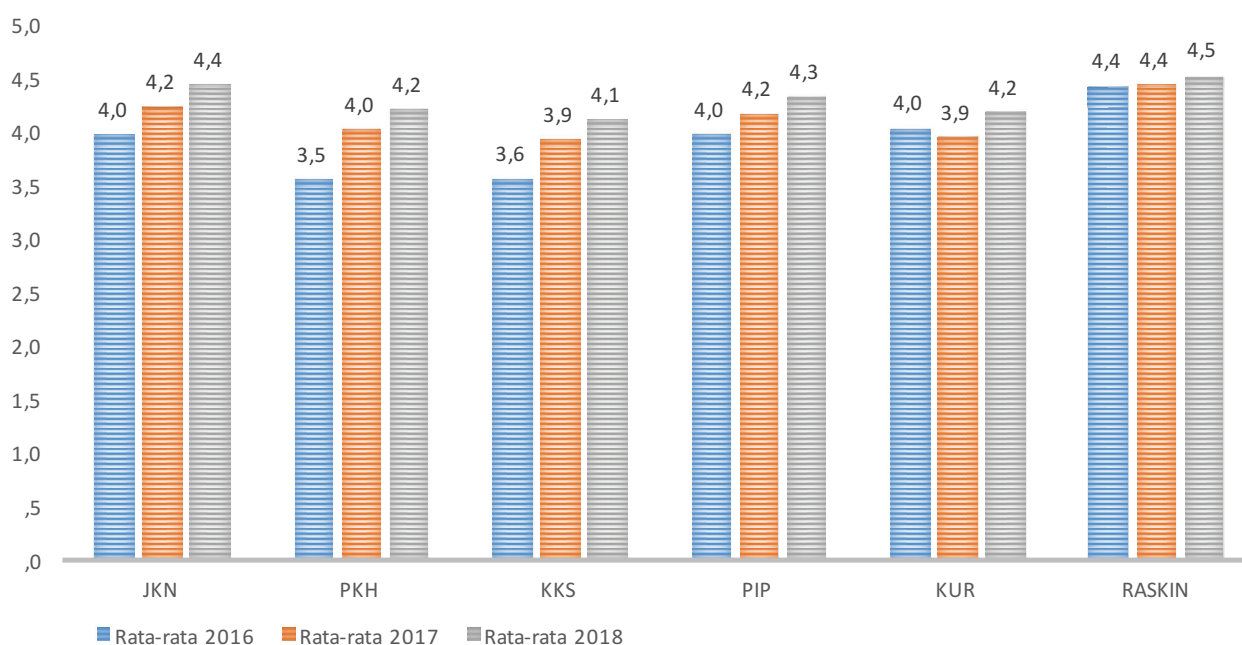
2.3. Kualitas Program Sosial

Jika dibandingkan dengan tahun 2016/2017, penilaian warga terhadap kememadai program sosial pada 2017/2018 lebih tinggi. Memang masih ada warga yang belum mengetahui program sosial. Begitu juga ada warga yang menilai program sosial tertentu belum memadai. Namun, pada pengukuran IBS 2017/2018 ini, ada indikasi bahwa menurut warga lebih banyak program yang memadai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Aspek program yang dinilai warga masih belum baik adalah pelayanan. Menurut warga, pelayanan masih kurang memuaskan. Begitu juga program sosial belum cukup mudah untuk didapatkan. Beberapa program masih belum tepat sasaran pada mereka yang membutuhkan. Prosesnya dinilai sudah semakin cepat dan dianggap tidak membebani. Barang dan jasa yang diterima sudah lebih sesuai dengan semestinya dan bermanfaat. Secara umum, hal ini yang menjadi pertimbangan warga untuk mempersepsikan bahwa pelaksanaan program pemerintah sudah sesuai dengan aturan serta cenderung baik dan bermanfaat.

Secara umum mereka menilai program sosial pada 2017/2018 meningkat kualitas dan efektivitasnya. Sekali lagi, ini mengindikasikan bahwa usaha pemerintah mencapai keadilan sosial mengalami peningkatan kuantitas dan kualitas. Meskipun masih belum optimal sepenuhnya, pelaksanaan program sosial selama satu tahun terakhir dinilai mengalami peningkatan kualitas dan efektivitas. Secara umum, ada kenaikan kualitas di setiap program sosial yang diselenggarakan pemerintah.

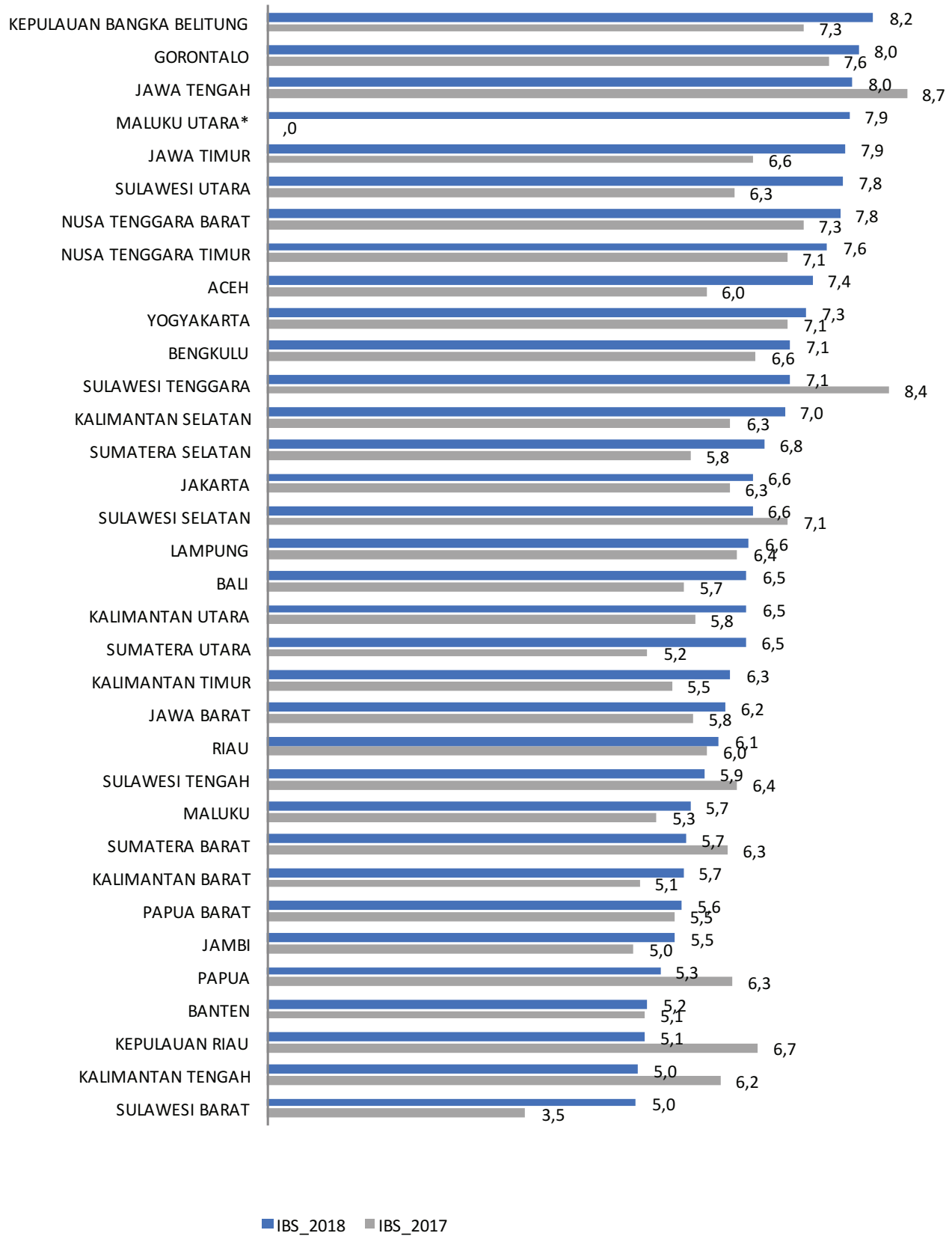
Grafik 3. Perbandingan Kualitas Program Sosial 2016, 2017, dan 2018



Jika dilihat per provinsi, menurut warga secara umum terjadi juga kenaikan kualitas program sosial di tingkat provinsi. Ada penurunan di sedikit provinsi, tetapi di kebanyakan provinsi terjadi peningkatan kualitas. Provinsi yang paling tinggi peningkatannya adalah Jawa Timur, Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi yang mengalami penurunan kualitas program sosial, menurut warga, adalah Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Papua, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah. Meski di beberapa provinsi terjadi penurunan kualitas, menurut warga, secara keseluruhan terjadi kenaikan kualitas program sosial di Indonesia. (Untuk Maluku Utara tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2017).



Grafik 4. Perbandingan Kualitas Program Sosial Per Provinsi 2017 dan 2018



BAB 3

Indeks Barometer Sosial

3.1. Indeks Barometer Sosial Nasional

Indeks Barometer Sosial (IBS) hendak menjawab pertanyaan seberapa jauh usaha pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah mengupayakan pencapaian keadilan sosial melalui kebijakan program sosial. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menurut warga, apakah terjadi kenaikan kualitas program sosial? Hasil pengukuran IBS 2017/2018 mengindikasikan adanya kenaikan kualitas dibanding dua tahun sebelumnya.

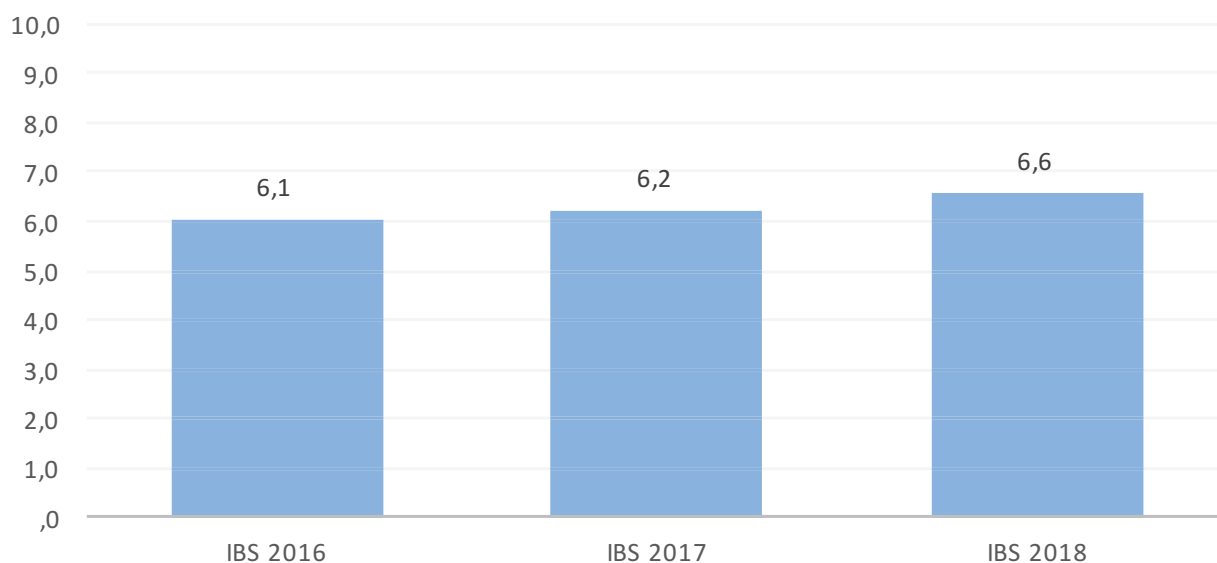
Indeks Barometer Sosial menggunakan rentang nilai 1-10 dan kategori nilai sebagai berikut:

- 0-2 = Tidak mengupayakan pencapaian keadilan sosial
- 2,1-4 = Kurang mengupayakan pencapaian keadilan sosial
- 4,1-6 = Agak mengupayakan pencapaian keadilan sosial
- 6,1-8 = Cukup mengupayakan pencapaian keadilan sosial
- 8,1-10 = Sangat mengupayakan pencapaian keadilan sosial

Secara keseluruhan, hasil Indeks Barometer Sosial 2018 adalah 6,6. Angka ini lebih tinggi daripada Indeks Barometer Sosial 2017 yang sebesar 6,2, dan Indeks Barometer Sosial 2016 sebesar 5,8. Meski hasil pengukuran saat ini belum mengubah kategori IBS dari “cukup mengupayakan pencapaian keadilan sosial” menjadi “sangat mengupayakan pencapaian keadilan sosial”, kenaikan ini cukup besar. Hanya, jika dilihat dampaknya, kenaikan ini belum optimal. Masih diperlukan peningkatan kualitas program sosial agar perubahannya signifikan menjadi “sangat mengupayakan pencapaian keadilan sosial”. Upaya yang lebih besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih diperlukan agar dampak dan manfaat program sosial optimal dan diterima oleh seluruh warga. Sejauh ini masih ada banyak warga yang merasa belum mendapatkan manfaat dari program sosial. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kuantitas dan kualitas program sosial agar dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.

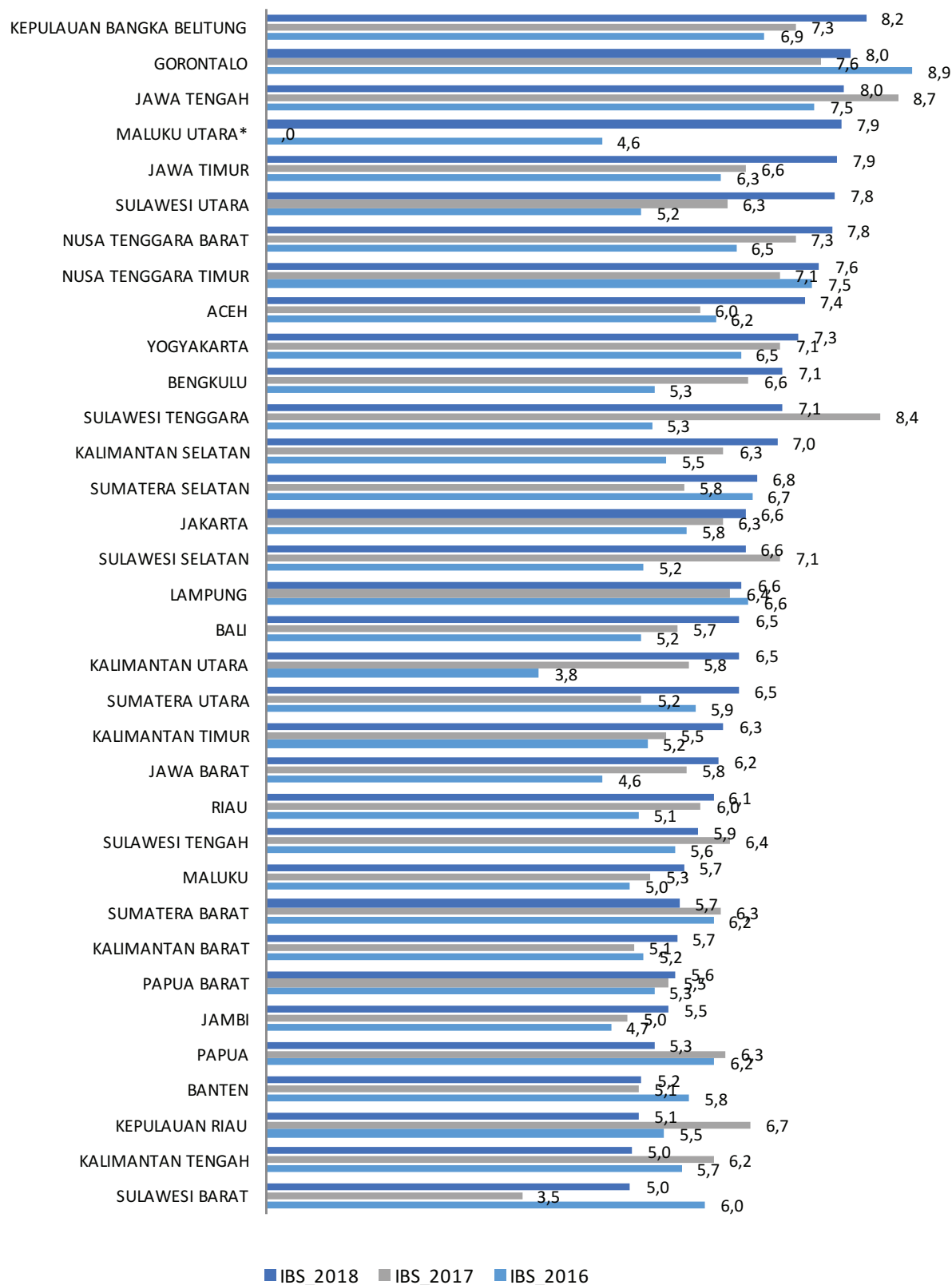


Grafik 5. Skor IBS 2018 Nasional dan Perbandingannya dengan Dua Tahun Sebelumnya



Dibandingkan dengan hasil pengukuran IBS 2016 dan 2017, ada peningkatan indeks yang mengindikasikan adanya peningkatan kualitas dan efektivitas program sosial di Indonesia pada 2018. Secara umum, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Indeks Barometer Sosial pada tiga tahun terakhir. Jika dilihat per provinsi, selama tiga tahun secara umum juga terjadi kenaikan. Jika dilihat dari setiap provinsi, ada indikasi bahwa deviasi antar-provinsi tidak terlalu jauh pada Indeks Barometer Sosial 2018. Hal ini mengindikasikan kestabilan dan kesetaraan distribusi keadilan sosial sehingga meminimalkan ketimpangan di setiap provinsi. Walau demikian, ini bukan berarti setiap wilayah dan provinsi sudah optimal menjalankan program sosial.

Grafik 6. Skor IBS 2018 Per Provinsi dan Perbandingannya dengan Dua Tahun Sebelumnya

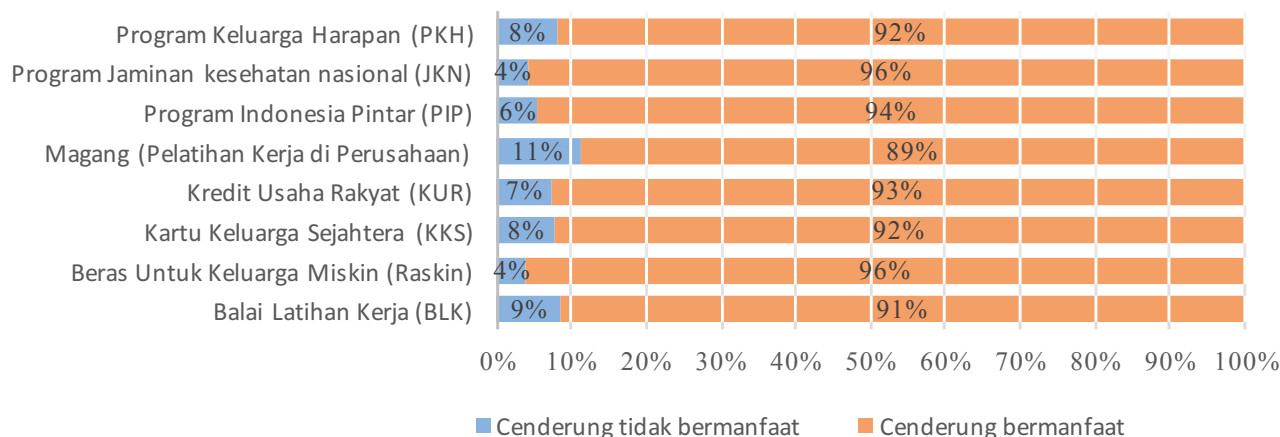


3.2. Penilaian Warga tentang Program Sosial

Hampir seluruh warga menilai program sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia bermanfaat. Program Beras Miskin (Raskin) dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menempati peringkat tertinggi, dinilai paling bermanfaat oleh warga, disusul oleh dan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program-program lainnya juga dinilai tinggi manfaatnya. Program sosial itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Program Magang.

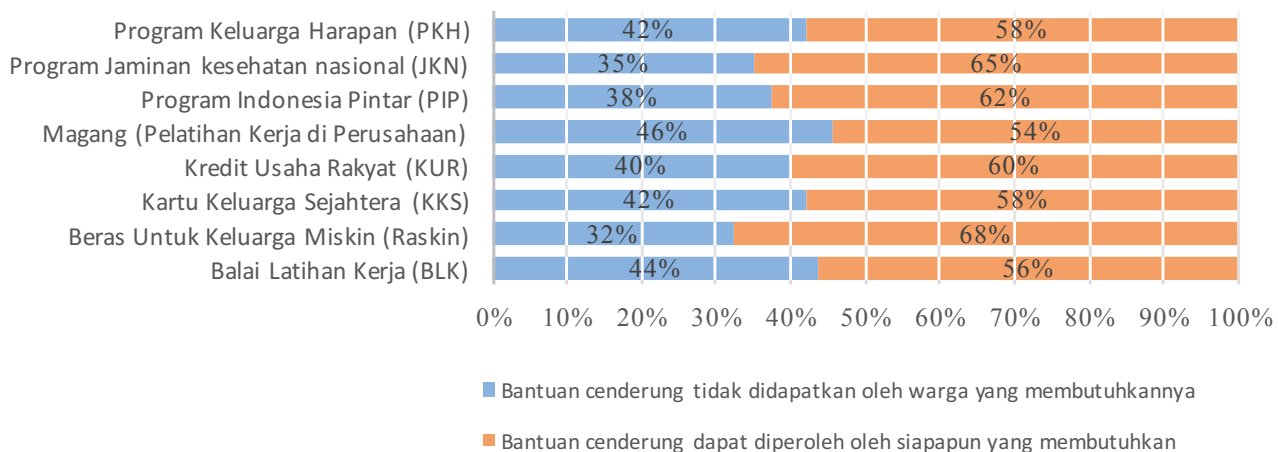
Program-program sosial yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia dibutuhkan warga. Warga memang membutuhkan manfaat dari program-program itu. Karena dibutuhkan warga, penyerapan terhadap program pun berlangsung secara optimal. Warga pun merasakan mendapat manfaatnya. Keseluruhan program sosial itu dinilai memang dibutuhkan oleh warga dan dipersepsikan memberikan manfaat bagi penerimanya. Program-program ini diharapkan oleh warga agar terus berlangsung. Warga berharap pemerintah menyediakan lebih banyak lagi program semacam itu. Mereka juga berharap akan lebih banyak lagi warga yang berkesempatan mendapatkan bantuan dari program-program tersebut. Warga yang membutuhkan program sosial secara antusias menyambut program sosial yang diselenggarakan pemerintah. Mereka secara optimal mengambil manfaat dari program-program itu.

Grafik 7. Kemanfaatan Program Sosial yang Diselenggarakan Pemerintah



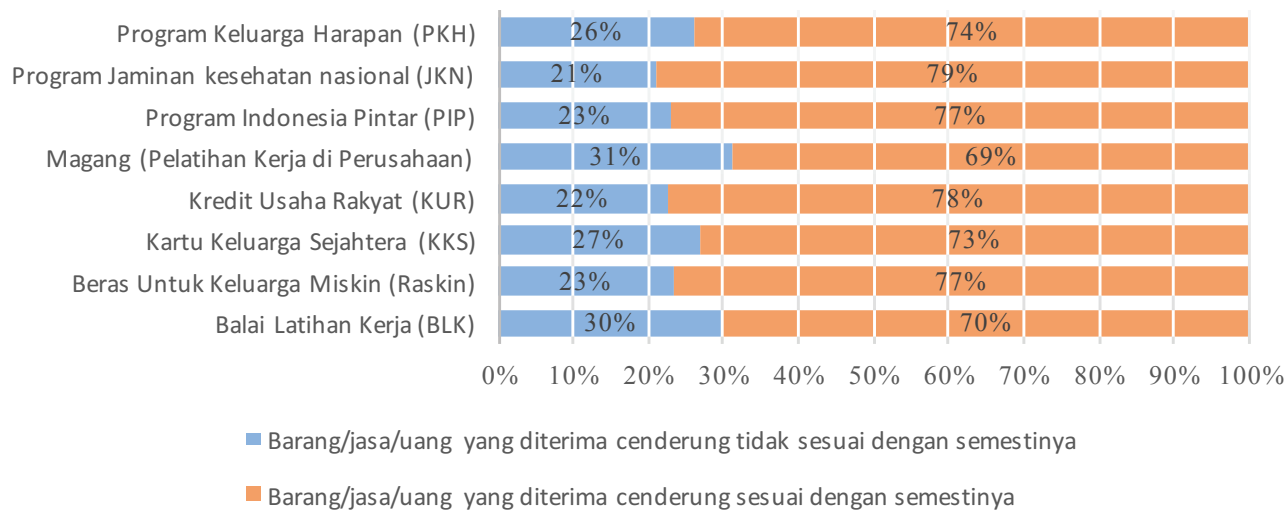
Masih banyak warga mempersepsikan bahwa program-program itu masih belum terlalu tepat sasaran. Dalam arti, masih banyak warga yang mendapatkan program namun sebenarnya tidak membutuhkan. Sementara itu, masih banyak yang membutuhkan bantuan, justru mereka tidak mendapatkannya. Memang jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, terdapat peningkatan ketepatan-sasaran pada program-program itu. Tetapi tetap saja lebih dari sepertiga dari keseluruhan responden menilai bahwa program sosial masih belum tepat sasaran pada warga yang membutuhkan program itu.

Grafik 8. Ketepatan Sasaran Program Sosial



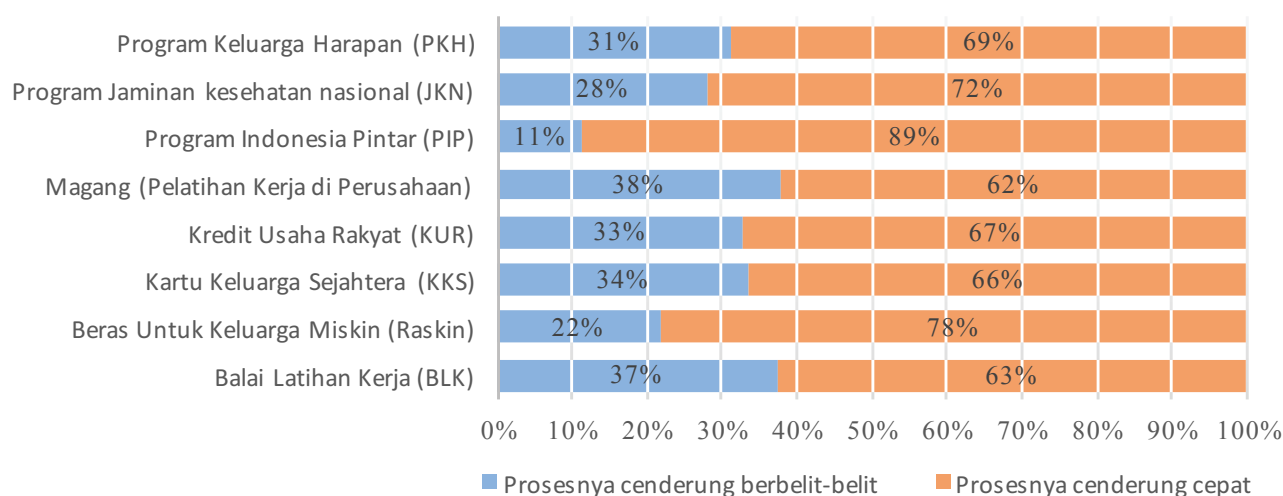
Hal lain yang dipersepsikan masih kurang memadai adalah kesesuaian barang, uang, atau jasa yang diterima. Meskipun ada kenaikan kesesuaian dibanding tahun-tahun sebelumnya, masih banyak warga menilai bahwa barang/uang/jasa yang mereka terima belum sesuai dengan semestinya. Masih ada persepsi warga yang menyatakan bahwa program sosial masih kurang tepat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Karena itu, penentuan jenis bantuan, besaran bantuan, dan kepada siapa bantuan akan diberikan, belum optimal. Walaupun demikian, adanya peningkatan kesesuaian perlu mendapat apresiasi. Hal ini diharapkan dapat ditingkatkan terus pada tahun-tahun berikutnya sehingga nanti dapat dikatakan bahwa kebijakan program sosial ini berhasil sepenuhnya.

Grafik 9. Kesesuaian Barang/Uang/Jasa yang Diterima



Pengukuran pada tahun 2018 ini, masih banyak warga yang menilai bahwa dalam pelaksanaannya, proses dan prosedur program sosial masih berbelit-belit dan kurang cepat. Prosedur yang lama dan panjang, serta persyaratan yang banyak dibebankan kepada warga, menyebabkan proses pelaksanaan pemberian bantuan menjadi lama. Walau demikian, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, warga menilai ada peningkatan kecepatan proses. Proses yang dinilai masih panjang dan lama ini perlu mendapatkan perhatian. Masih seperti tahun lalu, program yang prosesnya dinilai paling lambat adalah proses perolehan bantuan untuk mengikuti Magang dan Balai Latihan Kerja (BLK). Warga harus memenuhi banyak persyaratan dan menunggu lama untuk mendapatkan giliran mendapatkan pelatihan. Ini memberatkan karena warga membutuhkan keterampilan kerja untuk digunakan dalam bekerja dan mendapatkan penghasilan. Waktu tunggu yang lama sebelum mendapatkan pelatihan membuat mereka tetap mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan memenuhi nafkah keluarga. Selain BLK, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Keluarga Sejahtera, dan Program Keluarga Harapan juga dinilai prosesnya lama oleh banyak responden.

Grafik 10. Kecepatan Proses Program Sosial

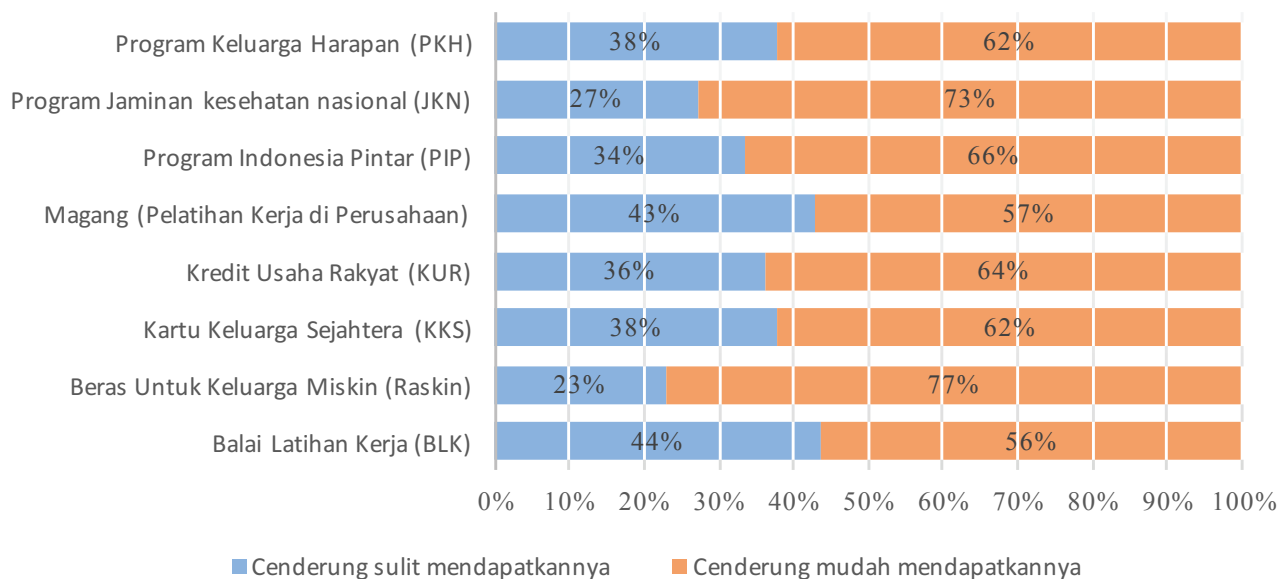


Masih banyak warga menilai bahwa perolehan bantuan sosial tergolong sulit. Hal ini terkait dengan proses yang panjang dan berbelit-belit, serta persyaratan yang banyak. Kemudahan mendapatkan bantuan program sosial merupakan hal penting bagi warga. Alasannya mereka yang membutuhkan biasanya juga mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Jika ditambah dengan kesulitan mendapatkan bantuan, kesulitan mereka bertambah. Beban mereka pun makin berat. Memang tingkat kesulitan memperoleh bantuan menurun. Begitu juga kebanyakan warga menilai proses perolehan bantuan sosial lebih mudah. Namun masih banyak responden (23–44 persen) menilai bahwa program sosial masih cukup sulit untuk diperoleh. Seperti pada tahun sebelumnya, warga mengharapkan prosedur program sosial tidak terlalu panjang dan tidak berbelit-belit. Kesesuaian antara data warga yang membutuhkan bantuan dan data

yang aktual di masyarakat juga diharapkan ditingkatkan sehingga tidak terjadi proses yang merepotkan. Contohnya, ada warga yang mendaftar ulang dari awal lagi karena datanya hilang dan mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan.

Sudah ada pemutakhiran data tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah warga yang membutuhkan. Warga juga masih mengharapkan pembenahan prosedur pemberian bantuan. Perbaikan sistem dan mekanisme pemberian bantuan sudah mengalami perbaikan tetapi dinilai belum menyeluruh. Mereka sangat berharap adanya mekanisme dan prosedur yang lebih mudah dan ringkas dalam pemberian bantuan kepada warga. Harapan warga, mereka tidak perlu mengorbankan kepentingan lain demi mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan atau untuk mengambil bantuan yang diperuntukkan bagi mereka. Warga berharap agar biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengambil bantuan dapat seminimal mungkin sehingga mereka tidak mengalami kerugian ketika berusaha mendapatkan bantuan.

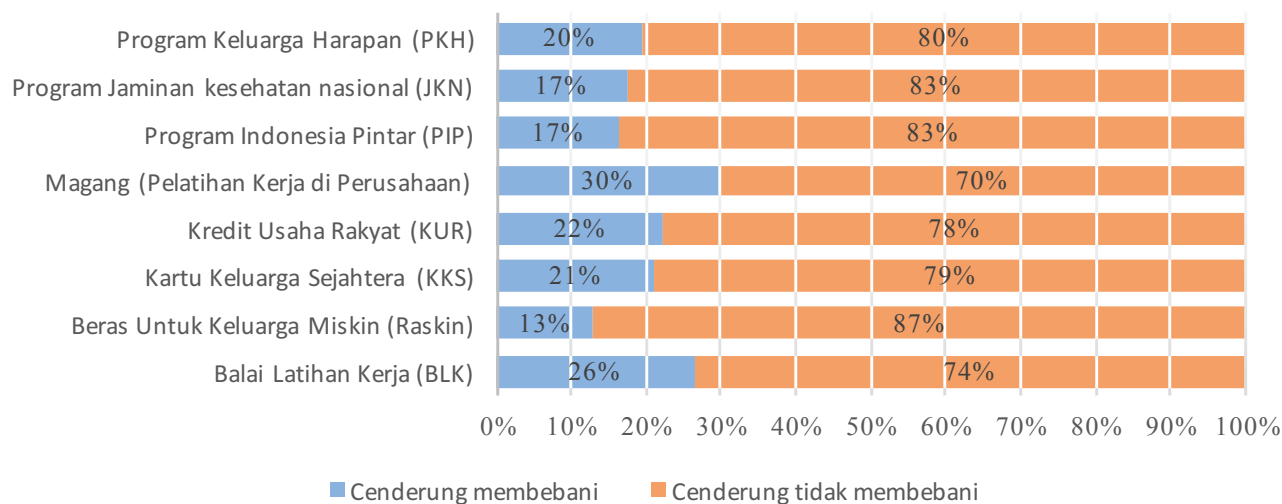
Grafik 11. Kemudahan Mendapatkan Bantuan Program Sosial



Secara keseluruhan, dalam mendaftar untuk memperoleh bantuan melalui program sosial, warga tidak lebih terbebani dibanding tahun sebelumnya. Tetapi masih banyak warga yang merasa terbebani ketika mereka menerima bantuan. Sekali lagi, warga berharap perolehan dipermudah dengan syarat yang tidak terlalu banyak. Peningkatan kualitas program sosial mendapatkan apresiasi dari warga seiring dengan meningkatnya harapan bahwa kualitasnya akan terus membaik pada tahun-tahun mendatang. Warga juga berharap pemerintah semakin meningkatkan usaha dalam menjalankan program sosial sehingga kualitasnya optimal dan berdampak bagi kesejahteraan seluruh warga. Meningkatnya harapan mengindikasikan warga menaruh kepercayaan pada pemerintah, bahwa pemerintah mau dan mampu meningkatkan kualitas program sosial pada tahun-tahun mendatang.



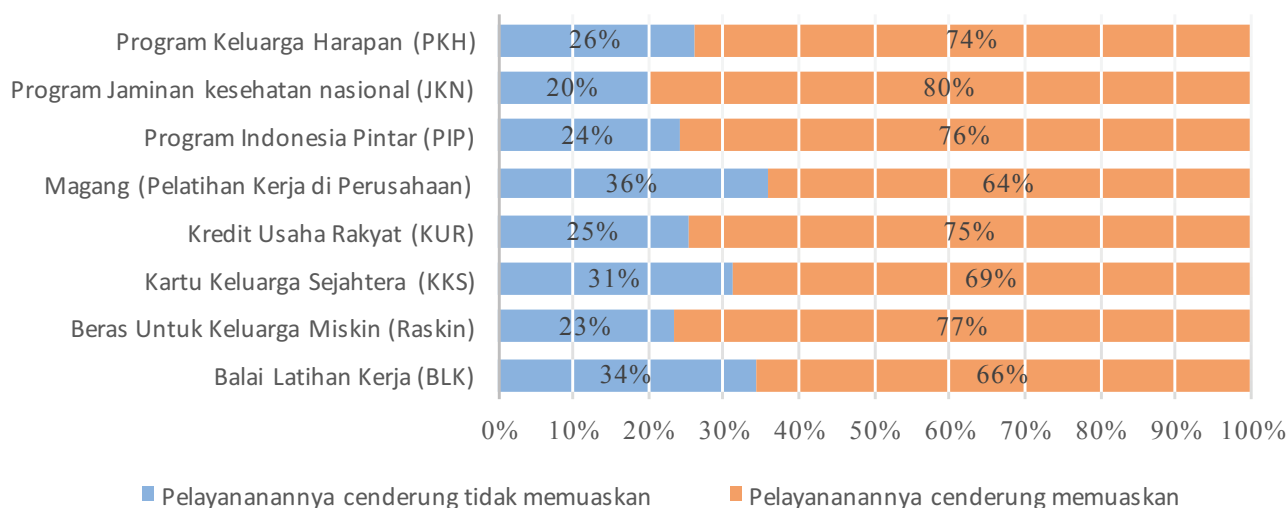
Grafik 12. Se jauh Mana Program Sosial Membebani



Ada peningkatan kepuasan warga atas pelayanan program sosial. Walau demikian, masih banyak warga yang menilai pelayanan dalam program sosial masih belum memuaskan (20–36 persen). Secara umum tingkat kepuasan terhadap pelayanan program sosial tergolong cukup. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan warga, program sosial sebaiknya tidak diberikan di tempat-tempat yang tidak nyaman untuk didatangi warga pada saat yang bersamaan (ruangan yang sempit atau jarak yang jauh). Pengaturan waktu pemberian bantuan yang efektif perlu dilakukan agar warga tidak mengantre lama, berdesak-desakan, atau bahkan merasa tidak mendapatkan kejelasan kapan mereka akan menerima bantuan.

Hasil survei memperlihatkan, kualitas pelayanan program sosial terkait dengan pekerjaan yang paling perlu ditingkatkan. Penilaian tidak puas paling banyak diberikan oleh warga terhadap program-program tersebut. Program Jaminan Kesehatan Nasional dinilai paling memuaskan pelayanannya oleh warga. Warga berharap akan ada peningkatan kualitas pelayanan di semua program sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah.

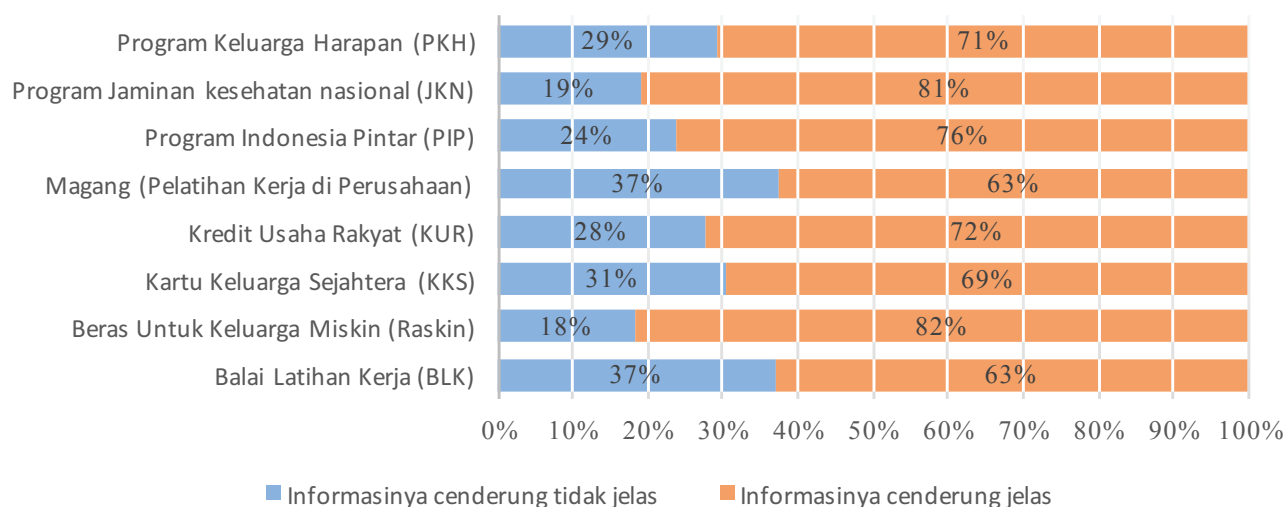
Grafik 13. Kepuasan terhadap Pelayanan Program Sosial



Berdasarkan pengukuran IBS 2018, diketahui adanya indikasi perbaikan pemenuhan kriteria keadilan sosial, baik keadilan distributif maupun keadilan prosedural. Persepsi warga menyatakan ada lebih banyak program yang mengalami kenaikan daripada yang mengalami penurunan. Peningkatan kualitas terjadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski belum semua warga menilai baik, kebanyakan warga sudah memberi penilaian positif.

Untuk kriteria keadilan prosedural, melalui survei ini digali persepsi warga tentang kejelasan informasi mengenai program sosial dan kesesuaian pelaksanaan program sosial dengan aturan yang sudah ditentukan. Kejelasan informasi mencakup informasi mengenai tujuan, sasaran, persyaratan, prosedur, dan waktu pelaksanaan program sosial. Hasilnya, warga menilai informasinya lebih jelas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal kesesuaian pelaksanaan dengan aturan mencakup kesesuaian prosedur, juga terjadi peningkatan kesesuaian. Dilihat dari proses, standar pelayanan, pelaksana, serta jenis dan besar bantuan yang ada dinilai lebih positif daripada tahun sebelumnya. Secara umum pelaksanaan program sosial dinilai sesuai dengan aturan.

Grafik 14. Kejelasan Informasi Program Sosial



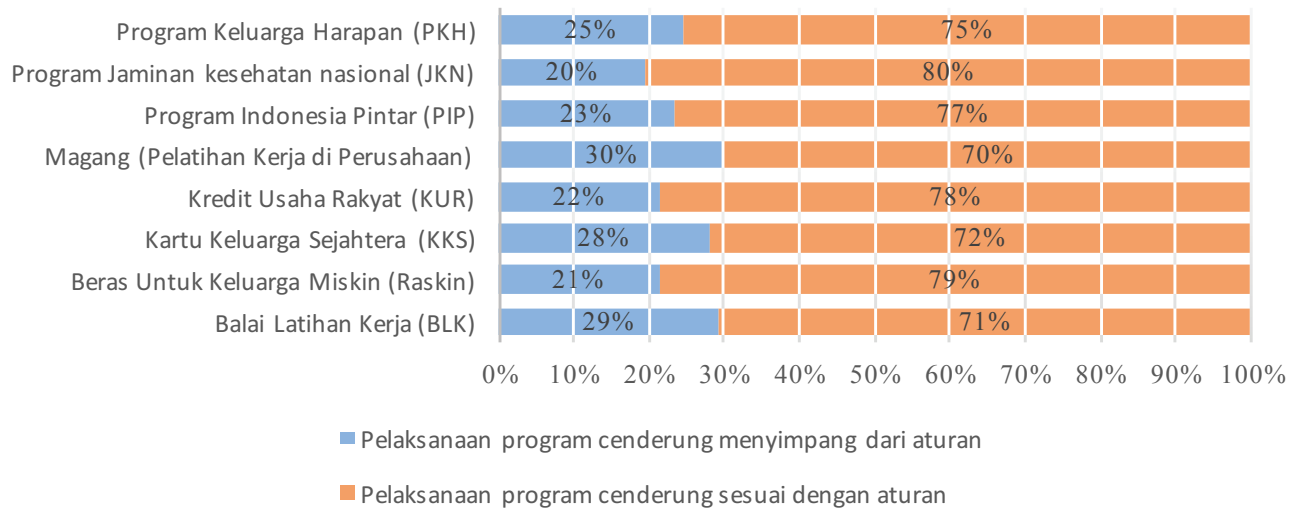
Untuk semua program, masih dibutuhkan perbaikan kualitas. Belum ada program yang sepenuhnya dinilai sangat baik atau baik oleh warga. Pada setiap program, warga menilai ada aspek yang masih kurang dan perlu ditingkatkan kualitasnya. Namun dengan meningkatnya kualitas dalam satu tahun terakhir ini, warga jadi mau berharap lebih banyak kepada pemerintah agar kualitas program sosial terus meningkat. Warga menilai pemerintah sebenarnya dapat diandalkan untuk dapat menyelenggarakan program sosial secara lebih baik pada masa datang.

Kepercayaan dan dukungan warga meningkat terhadap pemerintah karena warga melihat kapabilitas pemerintah untuk menyelenggarakan program sosial yang baik meningkat dari



tahun ke tahun. Peningkatan dukungan dan kepercayaan warga ini merupakan tambahan kekuatan bagi pemerintah. Hal ini sepatutnya dijadikan pendorong bagi pemerintah untuk menyelenggarakan program sosial yang lebih baik. Itu adalah tanda apresiasi dari warga kepada pemerintah. Harapan yang besar dari warga harus ditanggapi dengan usaha meningkatkan kualitas yang lebih baik. Pemerintah perlu memanfaatkan kerja sama dengan warga untuk menghasilkan program sosial yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Grafik 15. Kesesuaian Pelaksanaan Program Sosial dengan Aturan



Bab 4

Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

1. Menurut penilaian warga, ada peningkatan kualitas program sosial yang diselenggarakan pemerintah. Indeks Barometer Sosial meningkat dari 6,2 menjadi 6,6. Meski masih dalam kategori “cukup mengupayakan tercapainya keadilan sosial”, peningkatan ini cukup signifikan.
2. Meski ada peningkatan dari tahun 2016/2017 ke 2017/2018, program sosial masih belum optimal dan dampak positifnya belum menjangkau semua warga yang membutuhkan.
3. Keseluruhan program sosial yang diselenggarakan pemerintah pada 2017/2018 dinilai bermanfaat, lebih mudah didapatkan, lebih sesuai dengan target penerimanya, dan lebih sesuai dengan aturan.
4. Seperti di tahun sebelumnya, Program Magang dan Balai Latihan Kerja dan Magang masih sedikit diakses oleh masyarakat dan dinilai oleh warga dan manfaatnya belum diperoleh oleh warga yang membutuhkan, serta banyak warga masih merasa sulit untuk mengaksesnya. Selain itu, program terkait dengan penyediaan lapangan kerja dan akses usaha masih dinilai kurang efektif.
5. Perlu peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program sosial agar program sosial berjalan lebih efektif.
6. Untuk memperbaiki kondisi yang masih dinilai membebani, pelaksanaan program sosial seharusnya menghindari proses yang berbelit-belit, memakan waktu banyak, rumit, dan bentuk bantuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelaksanaannya perlu dibuat lebih efisien dan fleksibel. Perlu diatur agar warga tidak harus mengorbankan banyak waktu dan keperluan lain, tidak mengeluarkan biaya dan tenaga untuk bisa mendapatkan bantuan dari program sosial pemerintah.



4.2. Rekomendasi

1. Mekanisme dan prosedur perolehan program sosial perlu diperbaiki agar tidak panjang dan berbelit-belit serta dapat sampai pada orang yang tepat. Tingkatkan kesesuaian antara data warga yang membutuhkan bantuan dan data aktual di masyarakat. Dengan demikian tidak perlu lagi ada warga yang mendaftar ulang dari awal dan mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan.
2. Masih diperlukan standardisasi pelaksanaan program sosial, mencakup di antaranya prosedur operasional, durasi, frekuensi, besaran bantuan, proses pemberian bantuan, target penerima bantuan, pelaksana program, serta aktivitas pemantauan dan evaluasi.
3. Masih seperti tahun 2017/2018, masalah birokrasi dan mindset dari pelaksana program sosial masih belum sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Perbaiki birokrasi mencakup perubahan kerangka pikir, mindset, bahkan paradigma yang mendasari pemerintahan dan birokrasi masih diperlukan untuk menghasilkan program sosial yang berkualitas tinggi.
4. Perlu audit independen dari pihak di luar pemerintah untuk mengevaluasi dan menghasilkan usulan perbaikan pelaksanaan program sosial.



Lampiran 1

Kerangka Teoretis

1. Keadilan Sosial sebagai Kerangka Teoretis Barometer Sosial

Barometer Sosial merupakan turunan dari konsep *social justice* (keadilan sosial) yang dikemukakan oleh Wolfgang Merkel, guru besar ilmu politik perbandingan di Universitas Humboldt, Berlin. Konsep keadilan sosial secara umum diartikan sebagai perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara. “Keadilan sosial” adalah elemen konstitutif pusat legitimasi, dan stabilitas dari setiap komunitas politik. Pada intinya konsep keadilan sosial didasari oleh postulat bahwa setiap individu harus diberdayakan untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri, dan untuk terlibat dalam partisipasi sosial yang luas. Latar belakang sosial tertentu, seperti keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau ketidaksamaan titik awal, tidak diizinkan mempengaruhi secara negatif rencana kehidupan pribadi.

Dimensi Keadilan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan kemiskinan (*Poverty prevention*);
2. Akses ke pendidikan (*Access to education*);
3. Inklusi pasar tenaga kerja (*Labor market inclusion*);
4. Kohesi sosial dan non-diskriminasi (*Social cohesion and non-discrimination*);
5. Kesehatan (*Health*);
6. Keadilan antar-generasi (*Intergenerational justice*).

Konsep keadilan ini peduli dengan penjaminan setiap kesempatan individu yang benar-benar sama untuk realisasi diri melalui investasi yang ditargetkan dalam pengembangan “kapabilitas” individu. Yang dikejar bukan “penyetaraan” keadilan distributif atau hanya kesetaraan kesempatan hidup formal dengan aturan main dan kode prosedur yang diterapkan sama. Keadilan sosial dapat dipahami sebagai kerangka aturan dan pedoman bagi masyarakat partisipatif yang mengaktifkan dan memampukan anggotanya. Penerapannya mensyaratkan negara kuat dipimpin oleh aktor yang mengerti kebutuhan akan kesetaraan sosial sebagai alat untuk memastikan kesempatan partisipasi.





Gambar Model Pencapaian Keadilan Sosial

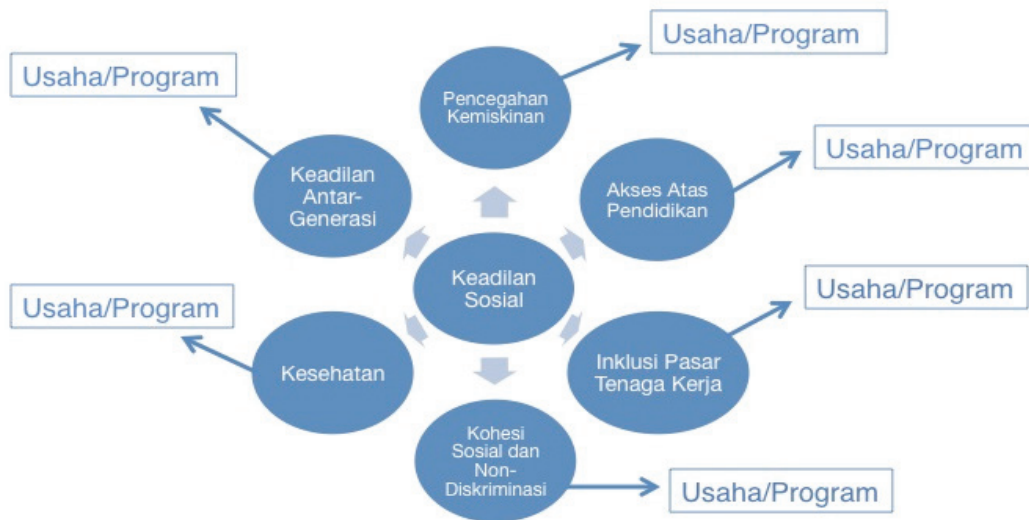
Konsep barometer sosial berfokus pada karakteristik dan usaha-usaha untuk menegakkan keadilan sosial serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara operasional, pemahaman mengenai barometer sosial dilakukan dengan mencermati program-program sosial pemerintah dan usaha departemen terkait dalam menegakkan keadilan sosial di Indonesia.

2. Operasionalisasi Barometer Sosial

Operasionalisasi barometer sosial mengikuti dimensi keadilan sosial. Barometer sosial diperoleh melalui pencermatan terhadap pencapaian keadilan sosial melalui program sosial, faktor yang berperan dalam keberhasilan program, serta stake-holder keadilan sosial mencakup warga negara, pemerintah, partai politik, CSO (*civil society organization*). Dalam bentuk operasionalnya, dimensi-dimensi itu tampil dalam bentuk program, seperti program pencegahan kemiskinan, bantuan pendidikan, balai latihan kerja, penyediaan lapangan kerja, perlindungan terhadap kaum minoritas, pelayanan kesehatan bagi semua, dan pelestarian sumber daya alam. Terhadap dimensi-dimensi itu diajukan pertanyaan-pertanyaan yang perumusannya didasari oleh konsep keadilan distributif dan keadilan prosedural.

Gambar Skema Penemuan Pencapaian Keadilan Sosial

Dimensi Keadilan Sosial



Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program sosial setiap tahunnya. Program-program itu merupakan bentuk usaha pemerintah untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Se jauh mana program itu efektif dan berdampak, perlu dikaji dan dievaluasi, salah satunya melalui penilaian warga. Pertanyaannya: Apakah manfaat program-program itu tersaji dan diterima oleh warga? Untuk menjawabnya, perlu ditanyakan kepada warga sejauh mana mereka menerima manfaat itu, dan lebih rinci lagi, apakah akses mereka ke program sosial itu terbuka dan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan dari program-program itu.



Lampiran 2

Metodologi

1. Pendekatan

Secara umum, survei ini mengadopsi perspektif keadilan sosial sebagaimana dituangkan dalam Indeks Keadilan Sosial yang disusun oleh Wolfgang Merkel/Bertllemann Stiftung. Perangkat lunak itu disadur dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan metode survei. Metode itu antara lain mengukur dan menilai kebijakan mengatasi kemiskinan, ketimpangan, kinerja pelayanan kesehatan, pasar kerja, dan sebagainya.

2. Waktu Pelaksanaan

Survei di 34 provinsi dilaksanakan selama tiga bulan pada Agustus hingga Oktober 2018. Alokasi waktunya, dua bulan untuk persiapan dan pelaksanaan pengambilan data lapangan, serta satu bulan untuk pengolahan laporan editing.

3. Permasalahan

Masalah terkait program sosial diturunkan ke dalam enam pertanyaan yang diajukan kepada responden sebagai berikut.

1. Menurut warga, seberapa efektif penyelenggaraan program sosial yang oleh Pemerintah Indonesia?
2. Kebijakan-program sosial apa yang dianggap penting dan bermanfaat bagi warga negara?
3. Kebijakan-program sosial apa yang dinilai mendesak diadakan?

Keterangan:

- “Kebijakan dan program sosial” adalah 6-7 program yang kini tengah dijalankan pemerintah.
- “Kebijakan-program sosial” adalah program-program yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan sosial, antara lain jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan subsidi.

Jawaban warga terhadap empat pertanyaan tersebut akan dikelompokkan ke dalam empat kelompok/kategori jawaban kualitatif dan akan dikuantifikasi dan diinterpretasikan sebagai berikut:

- Penting dan bermanfaat/sangat baik
- Baik/sedang
- Kurang/buruk
- Tidak tahu

Indikator dari tiap-tiap pertanyaan adalah sebagai berikut.

- Kebijakan sosial yang penting dan bermanfaat: informasi tersedia/diterima, barang dan jasa tersebut benar diterima, tidak memberi beban/*affordable*, menerima pelayanan dengan mudah, besaran manfaat, tidak diskriminatif, tidak berbelit, mekanisme pengaduan, dan lain-lain.
- Lembaga pemerintah yang berkinerja baik: programnya sesuai dengan kebutuhan, penyaluran tepat waktu, sasarannya tepat, tidak ada pemotongan, tidak menambah beban, tidak ada korupsi, pelayanan mudah, transparan, partisipasi, dan mekanisme pengaduan.

Kebijakan program sosial: yang dianggap penting dan mendesak untuk mengurangi beban atau memperluas kesempatan sosial warga tetapi belum ada dan belum dijanjikan, seperti jaminan kesehatan, subsidi pupuk, bantuan beasiswa, dan jaminan tunai tidak bersyarat.

4. Metode Riset

4.1. Metode Pengukuran Indeks Barometer Sosial

Pengukuran indeks barometer sosial termasuk jenis riset kuantitatif. Metode riset yang digunakan adalah metode kuantitatif yang mengandalkan perolehan data pada wawancara, observasi, dan kuesioner. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau data yang diberi kode angka berdasarkan skala ordinal dan interval sehingga dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *self-report*. Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk memberikan pertanyaan dan mencatat jawaban (*self-report*). Melalui *self-report* partisipan diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya.



Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Dilihat dari tujuan dan pengolahan datanya, pengukuran barometer sosial ini termasuk dalam jenis riset deskriptif dan korelasional. Variabel-variabel yang diukur akan dideskripsikan dan dikorelasikan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antar-variabel.

4.2. Jumlah Responden dan Teknik Sampling

Untuk survei nasional, responden berjumlah 2.040 orang, mencakup di 34 provinsi di Indonesia. Untuk survei di Kabupaten Dompu, Timor Tengah Selatan, dan Pangket, responden tiap-tiap kabupaten sebanyak 400 orang, sehingga totalnya 1.200 orang.

Teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling, yaitu pengambilan sampel secara bertingkat, pertama dengan menentukan kelompok-kelompok sampel, kemudian sampel dipilih secara random dari kelompok-kelompok itu. *Multistage random sampling* seperti cluster sampling, tetapi melibatkan pemilihan sampel dalam *cluster* yang dipilih. Dengan teknik ini, pemilihan sampel dilakukan paling sedikit pada dua tahap (*stage*).

4.3. Penyusunan Instrumen Pengukuran

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran barometer sosial ini adalah alat ukur berupa skala dan kuesioner. Penyusunan alat ukur itu mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Identifikasi tujuan utama penggunaan alat ukur: Memperoleh Indeks Barometer Sosial;
2. Penentuan konstruk pengukuran: Komponen-komponen barometer sosial;
3. Identifikasi indikator yang mewakili konstruk dan mendefinisikan ranah (*domain*) barometer sosial yang akan diukur;
4. Menyiapkan rangkaian spesifikasi alat ukur, termasuk proporsi item yang akan dibuat berkaitan dengan tingkah laku yang akan diukur dari konstruk,
5. Konstruksi sejumlah item (*items pooling*);
6. *Review* item, uji keterbacaan, *expert judgment* dan revisi;
7. *Tryout*: pengambilan data lapangan pada sejumlah sampel representatif dari populasi yang dituju oleh alat ukur;
8. Analisis item: pengujian statistik terhadap item-item alat ukur; jika diperlukan, menghilangkan item-item yang tidak memenuhi kriteria item yang baik atau melakukan revisi terhadap item-item itu;
9. Uji reliabilitas dan validitas bentuk alat ukur final.

10. Membuat manual administrasi, skoring, dan interpretasi terhadap skor alat ukur (di antaranya membuat tabel norma, standar performa, dan *cutting scores*).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti. Teknik analisis data yang akan digunakan mencakup statistik deskriptif, teknik analisis korelasional dan pemodelan.

Untuk melihat gambaran umum subyek penelitian dilakukan perhitungan persentase, rata-rata (*mean*) serta penyebaran usia dan jenis kelamin subyek melalui statistik deskriptif. Analisis data dari variabel-variabel yang menjadi komponen barometer sosial dan hubungannya masing-masing terhadap variabel lain dilakukan dengan perhitungan *multiple correlation* dan *multiple regresion*.





infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

